

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *“Etika Profesi Hukum”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan ke-2, 2001)

Bagir Manan, *“Menegakkan Hukum Suatu Pencarian”*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009).

Charles Simabura, *“Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen”*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, cetakan 1, 2016).

Hasrul Halili, dkk., *“Rubuhnya Pengadilan Kami”*, (Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Open Institute Society (OSI), 2009)

Jimly Asshiddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, 2009)

-----, *“Peradilan Etik dan Etika Konstitusi”*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

-----, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009)

Komisi Yudisial RI, *“Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun”*, 2006.

-----, *“Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial”*, (Jakarta : Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012)

-----, *“Kiprah 8 Tahun Komisi Yudisial, Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan”*, (Jakarta : Pusat Analisis dan Layanan Informasi 2013)

Laporan Penelitian, *“Fungsi pengawasan terhadap aparatur peradilan untuk mewujudkan badan peradilan yang bersih”*, (Mahkamah Agung RI : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012)

Moh Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *“Pengantar Hukum Tata Negara”*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1983) , Hlm. 227.

Ni'matul Huda, *“Hukum Tata Negara Indonesia”*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Robert Klitgaard, *“Membasmi Korupsi”*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998)

Rusli Muhammad, *“Potret Lembaga Peradilan Indonesia”*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, (Jakarta : Raja Wali Pers, 2010)

-----, *“Sosiologi Suatu Pengantar “*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)

Titik Triwulan Tutik, *“Eksistensi Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial”*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007)

Wildan Suyuthi Mustofa, *“Kode Etik Hakim”*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013)

Zamrony, dkk, *“Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan”*, (Yogyakarta : Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2009)

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN

Undang Undang Noomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Komisi Yudisial RI No. 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Peraturan Komisi Yudisial No. 4 Tahun 2013 tentang Peraturan tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

### C. Jurnal

Ahmad Basuki, *“Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradillan Pidana”*, dalam Jurnal Perspektif, Volume XVIII Nomor 1 Tahun 2013 Edisi Januari

Ahmad Fadlil Sumadi, *“Pengawasan Dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya”*, dalam Jurnal Media Hukum, Vol 19, No 01, 2012

Bambang Widjojanto, *“Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret, (Jakarta: Direktorat Kenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2010

Bayu Yosa Baskara, *“Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif, dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran”*, dalam JOM Fekon, Vol 4, Nomor 1 (Februari) 2017

Rifqi S. Assegaf dan Nur S, *“Peradilan dan Penegak Hukum”*, Jurnal Jentera, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2005)

Rusli Muhammad, *“Eksistensi Hakim Dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan”*, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.3 Vol. 21 Juli 2014

Rosnah Ridwan dan Heri Tahir, *“Persepsi Hakim Terhadap Pengawasan Komisi Yudisial Bagi Perilaku Hakim (Studi Di Pengadilan Negeri Makassar),”* dalam Jurnal Tomalebbi, Vol 2, No 2, 2015

Winasis Yulianto, *“Rekonstruksi Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman”*, dalam Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012

#### D. Karya Tulis

Taufiqurrohman Syahuri, *“Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman”*

#### E. Internet

A.Muchtar, *“Pengawasan”*, Artikel Dosen, Universitas Noratama, dalam [www.noratama.ac.id](http://www.noratama.ac.id)

Amirullah, “MA Akui Kecolongan, Sistem Pengawasan Hakim akan Dievaluasi,”

(<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/063774021/ma-akui-kecolongan-sistem-pengawasan-hakim-akan-dievaluasi> )

Amran Suadi, “Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Menuju Peradilan Yang Agung,”

(<http://pasca.unisba.ac.id/sistem-pengawasan-badan-peradilan-di-indonesia-dalam-mewujudkan-kemandirian-kekuasaan-kehakiman-menuju-peradilan-yang-agung/>)

Databoks, “Legislatif dan Kepolisian, Lembaga Terkorup di Indonesia,”

(<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/13/legislatif-dan-kepolisian-lembaga-terkorup> )

D.Y. Witanto, “MA Terapkan Pengawasan Super Ketat Mungkinkah Masih Ada Jual Beli Perkara”, (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57f1d9f9e54a1/ma-terapkan-pengawasan-super-ketat--mungkinkah-masih-ada-jual-beli-perkara-br-oleh--dy-witanto>)

Diani Indah, “Administrasi Peradilan : Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu”

([https://www.kompasiana.com/dodoisland/administrasi-peradilan\\_550d8f44a3\\_331\\_1f2262e3ceb](https://www.kompasiana.com/dodoisland/administrasi-peradilan_550d8f44a3_331_1f2262e3ceb))

Hukum Online, “Perbedaan Pengadilan dengan Peradilan” (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses tanggal 08 Maret 2018).

-----, “Perbedaan Kewenangan MA dan KY Dalam Pengawasan Hakim”,

([http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt580fd463233f4/perbedaan-kewenangan-ma-dengan-ky-dalam-pengawasan-hakim#\\_ftn6](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt580fd463233f4/perbedaan-kewenangan-ma-dengan-ky-dalam-pengawasan-hakim#_ftn6))

-----,“*Pengawasan Ekternal Diperlukan untuk Memantau Sistem Peradilan*”,(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho15681/pengawasan-ekternaldiperlukan-untuk-memantau-sistem-peradilan>

-----,“*Kewenangan KY Perlu Diperkuat dalam Pengawasan Hakim*”  
(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5570085671c96/kewenangan-ky-perlu-diperkuat-dalam-pengawasan-hakim>

Indexa Law, “*Pantau Peradilan*” Lihat( <https://play.google.com/store/apps/details?id=indexalaw.id.pantauapp&hl=in>)

Indah Rahmayani, “*Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia*”, ([https:// www. kominfo. go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media))

Kompas,” *Pengawasan MA Tak Efektif*”, ([https:// www.pressreader. com/indonesia/kompas/20171229/281492161691509](https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171229/281492161691509))

Metro News, “*Ky Terima 1682 Laporan Masyarakat*”,  
(<https://m.tempo.co/read/news/2017/01/24/063839284/ky-terima-1-682-laporan-masyarakat-sepanjang-2016>)

Muhammad Hafil ,”*KY Terima Laporan Selama 2017*”  
(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/21/p1b359430-ky-terima-ribuan-laporan-selama-2017>)

Ombudsman Republik Indonesia.”*Praktik Pencaloan Lembaga Peradilan sangat Memprihatinkan*”, <http://ombudsman.go.id/index.php/berita/berita/siaran-pers-ombudsman/1621-praktik-percaloan-lembaga-peradilan-sangat-mengkhawatirkan.html>

Rifqi Assegaf, “*Pengawasan Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan*”, Makalah disampaikan pada seminar dan lokakarya yang diselenggarakan MAPPI FHUI tanggal 30-31 Juni 2002, (<https://vdocuments.mx/lembaga-pengawasan-sistem-peradilan-terpadu.html>)

Sandi Raka, “*Makalah Etika Profesi Hakim*”, (<http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html#>)

Satgas Peradilan Rakyat Indonesia, (<http://satgasperadilan.com/kegiatan/>)

#### F. Skripsi

Skripsi Ayuliawati, “*Kewenangan Majelis Kehormatan Konstitusi Dalam Rangka Pengawasan Hakim Konstitusi*”, Universitas Andalas, 2017.

Skripsi Ridho Matriza, “*Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2011*”, Universitas Andalas, 2013

